

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka Triwulan I Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2026 | Target Triwulan I | Realisasi s.d Triwulan I 2026 | Capaian (%) |
|-----------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
| I | Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas | | | | | |
| 1.1 | Indikator Kinerja 1.1 Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB | Persentase | 1,49% | -* | N/A | N/A |
| | Indikator Kinerja 1.2 Persentase Penyelesaian Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Jangka Menengah pada RPerpres Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru | Persentase | 100% | -* | N/A | N/A |
| II | Sasaran kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka | | | | | |
| 2.1 | Indikator Kinerja 2.1 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan | Persentase | 80% | 20% | 20% | 100% |

| | | | | | | |
|------------|--|------------|----------|----------|-------|----------|
| | Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka serta Peningkatan Utilitas ILMATEA | | | | | |
| 2.2 | Indikator Kinerja 2.2 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyelesaian Regulasi Terkait untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka | Persentase | 80% | 20% | 20% | 100% |
| III | Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka | | | | | |
| 3.1 | Indikator Kinerja 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka | Indeks | 3 dari 4 | 3 dari 4 | N/A** | N/A |
| IV | Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola di Unit Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik | | | | | |
| 4.1 | Indikator Kinerja 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat | Presentase | 92% | 25% | 33% | 133,33 % |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Transportasi, Elektronika, dan Aneka | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|

*target tahunan **survey dilaksanakan semesteran, triwulan I belum dilaksanakan

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

| | |
|----------|---|
| 1 | Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas |
|----------|---|

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: “Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB”

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB

Latar Belakang

Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 s.d. 2029. Perekonomian Indonesia pernah mencapai pertumbuhan 8% pada tahun 1995. Rata rata pertumbuhan 1989-1996 sebesar 7,3% didukung oleh key Driver yaitu Investasi/PMTB sebesar 4,9% s.d. 14,6% yoy, Konsumsi Rumah Tangga 2,9% s.d. 12,6% yoy, dan Ekspor (CPO, tekstil, migas) rata-rata 9,7% yoy per tahun. Adapun key sector yang menjadi penggerak pertumbuhan antara lain manufaktur (tekstil, otomotif) dan konstruksi, yang didukung dengan key policy yaitu deregulasi, perdagangan, dan investasi.

Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) merupakan salah satu sektor industri yang memiliki kontribusi signifikan terhadap industri pengolahan non migas. Pada Triwulan III-2024, share ILMATE tercatat sebesar 4,37% terhadap PDB Nasional. Laju pertumbuhan sektor industri ILMATE jauh di atas laju pertumbuhan PDB Nasional dan pertumbuhan industri pengolahan non migas. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan Industri ILMATE mencapai 10,13%, dimana laju pertumbuhan PDB Nasional hanya berkisar 5,31%, dan laju pertumbuhan industri pengolahan non migas sebesar 5,01%.

Kebijakan utama pada Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka difokuskan pada sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pada sektor industri pengolahan non migas khususnya logam, mesin, elektronika, dan aneka. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa tanggungjawab penuh terhadap naik atau turunnya industri pengolahan non migas berada di bawah wewenang Kementerian Perindustrian yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian.

Sasaran ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya industri pengolahan khususnya ILMATEA yang berkualitas dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis komoditi, meningkatkan ekspor serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Capaian IKU Asdep ILMATEA dihitung berdasarkan data Kontribusi PDB Lapangan Usaha yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang kemudian akan dibandingkan antara target dengan capaiannya, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Peningkatan Kontribusi ILMATEA terhadap PDB} = \frac{(\text{Kontribusi ILMATEA thd PDB}_t - \text{Kontribusi ILMATEA thd PDB}_{t-1})}{\text{Kontribusi ILMATEA thd PDB}_{t-1}}$$

ILMATEA mencakup 5 sektor dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Industri Pengolahan, yaitu:

1. Industri Logam Dasar
2. Industri Mesin dan Perlengkapan
3. Industri Alat Angkutan
4. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik
5. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 1,49%. Adapun tidak ada target triwulan pada IKU ini.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, ringkasan capaian indikator kinerja 1.1 sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2025 | Target Triwulan I | Realisasi | % Kinerja |
|--|------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB | Persentase | 1,49% | - | N/A | N/A |

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1, yaitu "Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB". Target kinerja tahunan untuk indikator ini adalah sebesar **1,49%**.

Namun, karena IKU ini bersifat **tahunan**, maka pada periode Triwulan II belum terdapat target maupun realisasi capaian. Oleh sebab itu, Target Triwulan I, Realisasi, dan Capaian Kinerja ditandai sebagai **N/A (Not Available)**. Ini berarti pengukuran kinerja belum dapat dilakukan pada periode berjalan dan baru akan dievaluasi secara penuh di akhir tahun 2026 sesuai dengan karakteristik indikator yang digunakan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | | | |
|-------------------|-------------------|--------|---|
| No | Rencana Aksi TW I | Status | Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb) |

| | | | |
|----|---|------------|--|
| 1. | Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait produktivitas dan daya saing ILMATEA | Terlaksana | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2025-2045 |
| 2. | Pengumpulan data dan informasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ILMATEA | Terlaksana | <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan FGD Arah Kebijakan Industri Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional 2025-2029 pada tanggal 27 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sehubungan dengan kondisi industri alsintan dalam negeri yang membutuhkan penajaman kebijakan, tidak hanya dari sisi penggunaan, tetapi juga dari sisi penguatan industri manufaktur dalam negeri yang terintegrasi dengan industri logam dan mesin nasional. |

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Industri alat angkutan mengalami kontraksi cukup dalam pada Triwulan I-2026 yaitu sebesar -5,02%, sedangkan PMI Indonesia turun dari 53,8 menjadi 50,1 pada Maret 2026.
2. Industri alat dan mesin pertanian (Alsintan) masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait tingginya ketergantungan pada impor komponen inti. Selain itu, sering ditemukan ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis alat dengan kondisi geografis lahan di lapangan. Permasalahan ini diperparah oleh kehadiran distributor tidak resmi yang mengaburkan transparansi asal-usul produk, sehingga menghambat efektivitas kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Perlu kebijakan untuk mengatasi gejolak geopolitik yang mendorong inflasi dan mengganggu rantai pasok industri.
2. Strategi masa depan industri Alsintan harus difokuskan pada penguatan struktur manufaktur, terutama dengan mendorong para pelaku industri untuk bertransformasi dari sekadar perakitan menjadi produsen komponen inti di sektor hulu dan antara. Selain itu, diperlukan langkah sistematis seperti standarisasi alat yang sesuai dengan karakteristik lahan lokal, perluasan jaringan layanan purna jual hingga ke daerah, serta pemberdayaan petani secara berkelanjutan. Terakhir, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengadaan menjadi kunci utama untuk menjamin integritas industri ini.

**1.2. Persentase
Penyelesaian
Penyusunan
Rencana Aksi
(Renaksi)
Jangka
Menengah pada
RPerpres Peta
Jalan
Pengembangan
Ekosistem
Semikonduktor
dan Teknologi
Baru**

Latar Belakang

Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 s.d. 2029. Perekonomian Indonesia pernah mencapai pertumbuhan 8% pada tahun 1995. Rata-rata pertumbuhan 1989-1996 sebesar 7,3% didukung oleh key Driver yaitu Investasi/PMTB sebesar 4,9% s.d. 14,6% yoy, Konsumsi Rumah Tangga 2,9% s.d. 12,6% yoy, dan Ekspor (CPO, tekstil, migas) rata-rata 9,7% yoy per tahun. Adapun key sector yang menjadi penggerak pertumbuhan antara lain manufaktur (tekstil, otomotif) dan konstruksi, yang didukung dengan key policy yaitu deregulasi, perdagangan, dan investasi.

Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) merupakan salah satu sektor industri yang memiliki kontribusi signifikan terhadap industri pengolahan non migas. Pada Triwulan III-2025, share ILMATE tercatat sebesar 4,51% terhadap PDB Nasional. Laju pertumbuhan sektor industri ILMATE jauh di atas laju pertumbuhan PDB Nasional dan pertumbuhan industri pengolahan non migas. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan Industri ILMATE rata-rata sebesar 4,10%, dimana laju pertumbuhan PDB Nasional hanya berkisar 5,03%, dan laju pertumbuhan industri pengolahan non migas sebesar 4,75%.

Kebijakan utama pada Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka difokuskan pada sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pada sektor industri pengolahan non migas khususnya logam, mesin, elektronika, dan aneka. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa tanggungjawab penuh terhadap naik atau turunnya industri pengolahan non migas berada di bawah wewenang Kementerian Perindustrian yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian. Dalam rangka memperkuat daya saing industri nasional dan menjawab tantangan global pada era transformasi digital, diperlukan upaya untuk mendorong terbentuknya sumber pertumbuhan ekonomi baru guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029. Dalam konteks tersebut, industri semikonduktor merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Industri semikonduktor tercatat memberikan kontribusi sekitar 19% terhadap total perdagangan barang elektronik global. Pemerintah mendorong pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru sebagai bagian integral dari penguatan sektor industri ILMATEA.

Semikonduktor merupakan teknologi kunci (enabling technology) yang menopang berbagai industri strategis, seperti elektronika, otomotif, alat kesehatan, pertahanan, energi terbarukan, serta teknologi digital dan kecerdasan artifisial. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem semikonduktor tidak hanya berorientasi pada aspek industri hulu-hilir, tetapi juga mencakup penguatan riset dan inovasi, pengembangan SDM, pembiayaan, regulasi, serta kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait.

Sasaran ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya industri pengolahan khususnya ILMATEA yang berkualitas dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah melalui

hilirisasi industri berbasis komoditi, meningkatkan ekspor serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase penyelesaian penyusunan renaksi jangka menengah sebagai lampiran pada RPerpres Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru dihitung berdasarkan seberapa banyak jumlah program dan kegiatan yang telah didetailkan dan dikonfirmasi oleh K/L pengampu yang dibandingkan dengan jumlah keseluruhan program dan kegiatan pada rencana aksi yang telah disusun.

Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase penyelesaian penyusunan rencana aksi Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka:

$$\% \text{ Penyelesaian Penyusunan Renaksi} = \frac{\text{Total renaksi yang didetailkan dan dikonfirmasi K/L}}{\text{Total renaksi yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Pengukuran ini mencerminkan tingkat kesiapan kebijakan operasional Pemerintah dalam mengakselerasi pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru sesuai dengan arah pembangunan industri nasional dan transformasi ekonomi.

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Adapun tidak ada target triwulan pada IKU ini.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, ringkasan capaian indikator kinerja 1.1 sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2026 | Target Triwulan I | Realisasi | % Kinerja |
|--|------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Persentase Penyelesaian Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Jangka Menengah pada RPerpres Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru | Persentase | 100% | - | N/A | N/A |

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | | | |
|-------------------|---|------------|---|
| No | Rencana Aksi TW I | Status | Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb) |
| 1. | Perumusan kerangka Renaksi jangka menengah berdasarkan batang tubuh RPerpres Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru yang telah disepakati. | Terlaksana | <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan diskusi untuk menyempurnakan rumusan rencana aksi berdasarkan batang tubuh RPerpres tentang Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru. Selain itu, terdapat tambahan program sebagai tindak lanjut dari kerja sama internasional antara Pemerintah Indonesia dan ARM yang baru dilaksanakan pada awal tahun 2026. |

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Penyusunan rencana aksi masih terkendala oleh belum lengkapnya input dari kementerian/lembaga, mengingat implementasi renaksi akan dilaksanakan oleh masing-masing kementerian/lembaga tersebut.
2. Pembagian peran dan tanggung jawab antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan rencana aksi belum sepenuhnya terdefinisi secara rinci.
3. Perbedaan tahapan perencanaan dan siklus program antar kementerian/lembaga menyebabkan penyesuaian waktu pelaksanaan rencana aksi menjadi tantangan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penguatan mekanisme koordinasi lintas kementerian/lembaga yang lebih terstruktur untuk memastikan percepatan penyampaian rencana aksi dan penyesuaian timeline pelaksanaan.
2. Menyusun matriks pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas seperti penentuan leading sector dan instansi pendukung dalam setiap rencana aksi guna menghindari tumpang tindih dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan.
3. Perbedaan timeline pelaksanaan program antar Kementerian/Lembaga, termasuk perbedaan durasi program tahunan dan multi-tahun, memerlukan sinkronisasi melalui koordinasi lebih lanjut agar pelaksanaan rencana aksi dapat berjalan secara selaras.

2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas di Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Presentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Kebijakan terkait Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka serta Peningkatan Utilitas ILMATEA;
2. Presentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Kebijakan Penyelesaian Regulasi Terkait untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Presentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Kebijakan terkait Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka serta Peningkatan Utilitas ILMATEA

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika dan aneka.

Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka merupakan sasaran kegiatan perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran kegiatan perspektif stakeholder. Dengan kata lain, kebijakan di bidang ILMATEA dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik, serta produk yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan.

Hasil Pengukuran Kinerja

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian terkait Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka serta Peningkatan Utilitas ILMATEA

$$\begin{aligned} \% \text{ efektivitas SKP} = & \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} \\ & + \text{Nilai Tahapan Ketiga} + \text{Nilai Tahapan Keempat} \end{aligned}$$

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Adapun target triwulan pada IKU ini sebesar 20%.

Hingga Triwulan I Tahun 2025\6, capaian indaktor kinerja 2.1 yaitu sebesar 20% mencapai 100% dari target Triwulan I Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2025 | Target Triwulan I | Realisasi | % Kinerja |
|--|------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Presentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Kebijakan terkait Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka serta Peningkatan Utilitas ILMATEA | Persentase | 80% | 20% | 20% | 100% |

Pada Triwulan I tahun 2026, Asisten Deputi ILMATEA telah menyelesaikan serangkaian tahapan dalam proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka (ILMATEA), serta upaya Peningkatan Utilitas sektor tersebut. Nilai efektivitas kinerja diperoleh berdasarkan hasil pelaksanaan empat tahapan siklus kebijakan sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Asisten Deputi ILMATEA telah mengidentifikasi isu strategis dan merumuskan fokus koordinasi untuk satu tahun ke depan. Keluaran yang telah diselesaikan pada tahap ini meliputi: (i) Undangan rapat dan daftar hadir; (ii) Notula/Risalah; (iii) Dokumen terkait hasil Rakor/FGD mengenai Pengembangan Industri Logam, Ekosistem Semikonduktor, dan KBLBB.

2. Tahap Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Pada tahapan ini, telah disusun alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program untuk menjawab isu-isu yang telah diidentifikasi. Keluaran yang telah dihasilkan meliputi: (i) Konsep berupa bahan kebijakan/program; (ii) Undangan, notula, dan daftar hadir rapat pembahasan alternatif kebijakan; (ii) Hasil rapat pembahasan kebijakan terkait sektor logam, semikonduktor, dan KBLBB

3. Tahap Koordinasi Formulasi Kebijakan

Unit kerja telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk merumuskan kebijakan bersama.

4. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Unit kerja juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang telah diformulasikan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | | | |
|-------------------|---|------------|---|
| No | Rencana Aksi TW I | Status | Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb) |
| 1. | Mengidentifikasi kendala/permasalahan dalam pemenuhan bahan baku serta peningkatan utilitas Industri Logam, Mesin | Terlaksana | Pelaksanaan FGD Arah Kebijakan Industri Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional 2025-2029 pada tanggal 27 Februari 2026, mengundang Kemenperin, Kementan, LKPP, BPKP, dan Asosiasi Alsintan. FGD menangkap pentingnya monitoring perkembangan industri dan penyelesaian hambatan (<i>debottlenecking</i>) secara cepat oleh Kemenko Perekonomian. |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 2. | Mengidentifikasi kendala/permasalahan dalam pemenuhan bahan baku serta peningkatan utilitas Industri Kendaraan Bermotor, Perkapalan, Kereta Api, Dirgantara, dan Alat Berat. | | <p>Keasdepan ILMATEA aktif dalam koordinasi terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan Infrastruktur Industrialisasi untuk Mendukung Pencapaian TKDN mencakup penguatan kapasitas industri komponen lokal agar dapat memenuhi standar TKDN yang dipersyaratkan dalam program KBLBB nasional. 2. Percepatan Infrastruktur SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) dimana rasio SPKLU terhadap kendaraan listrik saat ini masih berada di angka 1:26, jauh dari target ideal 1:17. Diperlukan intervensi kebijakan dan investasi untuk mempercepat pembangunan SPKLU di seluruh wilayah Indonesia. 3. Pengelolaan Limbah Baterai Kendaraan Listrik mencakup penyusunan regulasi terkait pengelolaan limbah baterai EV yang komprehensif, mencakup mekanisme daur ulang, pemrosesan akhir, dan tanggung jawab produsen, sebagai bagian dari tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. |
| 3. | Mengidentifikasi kendala/permasalahan dalam pengoptimalan kapasitas industri untuk peningkatan utilisasi Industri Handphone, komputer, Tablet (HKT) dan Alkes | | <p>Keasdepan ILMATEA aktif dalam koordinasi dan memberi masukan pada penyusunan Rancangan Peraturan Presiden terkait Pengendalian <i>International Mobile Equipment Identity</i> (IMEI) melalui sistem <i>Central Equipment Identity Register</i> (CEIR).</p> |

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Beberapa kendala industri Alsintan antara lain ketergantungan impor alsintan masih tinggi khususnya komponen inti; belum optimalnya

kesesuaian antara spesifikasi alsintan dengan kondisi geografis dan karakteristik lahan; dan praktik distributor siluman yang dapat mengaburkan asal-usul produk serta melemahkan kebijakan TKDN.

2. Terdapat beberapa pending matters pada substansi RPerpres IMEI. Pembagian tugas dan fungsi K/L dirasa masih belum bersifat final karena terdapat potensi hambatan dalam implementasi Perpres, misalnya solusi apabila sistem IMEI mengalami gangguan yang dapat menghambat validasi perangkat.
3. **Utilisasi Industri Kendaraan Bermotor yang Masih Rendah.** Pertumbuhan PDB sektor otomotif mengalami kontraksi, meskipun kontribusinya terhadap PDB nasional masih tercatat positif. Tingkat utilisasi industri kendaraan bermotor (KBM) cenderung stagnan bahkan menunjukkan tren penurunan sejak 2025 hingga 2026. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya penyerapan kapasitas produksi yang tersedia.

Transisi Menuju Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Industri otomotif tengah menghadapi tantangan besar dalam proses shifting dari kendaraan berbahan bakar minyak (KBM) menuju KBLBB. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah turut mendorong harga minyak ke level yang tinggi, sementara ekosistem KBLBB di dalam negeri belum siap sepenuhnya. Hal ini berdampak pada hambatan pasokan bahan baku dalam proses elektrifikasi kendaraan. Di sisi lain, upaya mendukung target Net Zero Emission (NZE) dan pengurangan beban subsidi BBM terhadap APBN menjadi urgensi tersendiri. Penurunan daya beli masyarakat juga turut memperlemah permintaan pasar.

Ekosistem KBLBB Belum Terbangun Secara Menyeluruh. Sebagai komponen utama penggerak KBLBB, ekosistem baterai masih memiliki banyak celah yang perlu ditangani, termasuk perdebatan mengenai pemilihan jenis baterai antara Lithium Ferro Phosphate (LFP) dan Nickel Manganese Cobalt (NMC). Menindaklanjuti Perpres No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian yang memuat roadmap pengembangan industri KBLBB nasional. Dalam roadmap tersebut, ditetapkan target produksi kendaraan listrik roda empat dan lebih sebesar 400.000 unit pada 2025, 600.000 unit pada 2030 dan 1.000.000 unit pada 2035,. Namun demikian, realisasi hingga tahun 2025 masih jauh dari target, di mana produksi kendaraan listrik roda empat baru mencapai sekitar 23.934 unit atau hanya sekitar 5,9% dari target 2025.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Pengembangan industri alsintan ke depan perlu diarahkan pada pendalaman struktur industri melalui penguatan industri hulu dan antara, serta mendorong transformasi pelaku industri dari perakitan menjadi produsen komponen utama; perlu upaya sistematis berupa penyusunan standar spesifikasi alsintan yang adaptif terhadap kondisi lokal, penguatan

jaringan layanan teknis hingga tingkat daerah, serta peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan; dan kepastian serta integritas dalam proses pengadaan.

2. Diperlukan percepatan pembahasan dan penguatan koordinasi antar-K/L, mengingat RPerpres ini telah disusun sejak tahun lalu. Hal ini penting agar pembagian tugas dan fungsi dapat lebih jelas, mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan, serta memperkuat efektivitas implementasi Perpres.
3. Sebagai Tindak Lanjut Pengembangan industri otomotif perlu diarahkan pada:

Perbaikan Infrastruktur Industrialisasi untuk Mendukung Pencapaian TKDN mencakup penguatan kapasitas industri komponen lokal agar dapat memenuhi standar TKDN yang dipersyaratkan dalam program KBLBB nasional.

Percepatan Infrastruktur SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) dimana rasio SPKLU terhadap kendaraan listrik saat ini masih berada di angka 1:26, jauh dari target ideal 1:17. Diperlukan intervensi kebijakan dan investasi untuk mempercepat pembangunan SPKLU di seluruh wilayah Indonesia.

Pengelolaan Limbah Baterai Kendaraan Listrik mencakup penyusunan regulasi terkait pengelolaan limbah baterai EV yang komprehensif, mencakup mekanisme daur ulang, pemrosesan akhir, dan tanggung jawab produsen, sebagai bagian dari tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

4. Adapun Target Kinerja Industri Otomotif perlu mengacu pada **Target Adopsi KBLBB sesuai Perpres No. 55 Tahun 2019** mencakup jumlah unit kendaraan listrik yang harus teradopsi pada periode yang ditetapkan.

Target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencakup peningkatan proporsi komponen lokal dalam rantai produksi KBLBB guna memperkuat industri nasional.

Target Populasi KBLBB Nasional selaras dengan target adopsi, mengukur total populasi kendaraan listrik yang beroperasi di Indonesia.

2.2. Presentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Kebijakan Penyelesaian Regulasi Terkait untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika dan aneka.

Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka merupakan sasaran kegiatan perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran kegiatan perspektif stakeholder. Dengan kata lain, kebijakan di bidang ILMATEA dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik, serta produk yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan.

Hasil Pengukuran Kinerja

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Penyelesaian Regulasi Terkait untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka

$$\begin{aligned} \% \text{ efektivitas SKP} &= \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} \\ &+ \text{Nilai Tahapan Ketiga} + \text{Nilai Tahapan Keempat} \end{aligned}$$

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Adapun target triwulan pada IKU ini sebesar 20%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja 2.2 yaitu sebesar 20% mencapai 100% dari target Triwulan I Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2025 | Target Triwulan I | Realisasi | % Kinerja |
|---|------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Presentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Kebijakan Penyelesaian Regulasi Terkait untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka | Persentase | 80% | 20% | 20% | 100% |

Dalam rangka mendukung pengembangan sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka (ILMATEA), unit kerja telah melaksanakan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara efektif melalui empat tahapan siklus kebijakan. Pelaksanaan tersebut menjadi

dasar penilaian **Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi** terhadap regulasi-regulasi pendukung sektor ILMATEA.

Tahap 1: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Unit kerja telah mengidentifikasi isu strategis dan merumuskan agenda koordinasi yang menjadi prioritas tahunan, seperti isu pengembangan industri logam dasar, ekosistem semikonduktor nasional, serta kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB).

Tahap 2: Penyusunan Alternatif Rekomendasi Kebijakan

Alternatif kebijakan dan/atau program disusun untuk menyelesaikan isu yang telah diidentifikasi, dengan mengedepankan pendekatan berbasis bukti dan hasil pemetaan stakeholder.

Tahap 3: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Asisten Deputi ILMATEA telah melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk menyusun regulasi strategis.

Tahap 4: Monitoring dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan kebijakan dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak implementasi kebijakan yang telah diformulasikan. Evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi perbaikan ke depan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | | | |
|--------------------------|---|---------------|---|
| No | Rencana Aksi TW I | Status | Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb) |
| 1. | Mengidentifikasi kendala/permasalahan implementasi TKDN dan P3DN untuk mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, | Terlaksana | <ul style="list-style-type: none">• Telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait Penetapan Peraturan tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).• Berdasarkan hasil FGD, seluruh peserta yang terdiri atas perwakilan Kementerian/Lembaga menyepakati perlunya perubahan regulasi sebagai dasar penguatan program |

| | | | |
|--|------------------------|--|--|
| | Elektronika, dan Aneka | | kerja P3DN. Beberapa urgensi yang mengemuka antara lain: (i) meningkatnya produk impor yang masuk tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa secara terstruktur; (ii) perlunya perencanaan belanja pemerintah yang lebih matang serta pengawasan rutin untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN); dan (iii) pemberdayaan industri dalam negeri guna memperkuat struktur industri, baik skala besar maupun usaha kecil dan menengah. |
|--|------------------------|--|--|

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Masih diperlukan penguatan sinergi dan kesamaan persepsi antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan program P3DN, termasuk dalam perencanaan, pengawasan, dan implementasi penggunaan produk dalam negeri dan TKDN.
2. Terdapat kebutuhan mendesak untuk penguatan pelaksanaan program P3DN, sementara proses perubahan Keppres masih berlangsung.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melaksanakan forum koordinasi dan FGD lintas Kementerian/Lembaga untuk menyepakati urgensi perubahan regulasi serta pembagian peran dalam implementasi P3DN.
2. Mendorong penyusunan dan pembahasan RKepmenko (Rancangan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) secara paralel sebagai dasar operasional sementara pelaksanaan Tim Nasional P3DN.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas di Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka ditunjukkan oleh pencapaian xx indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika dan aneka.

Hasil Pengukuran Kinerja

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum_{i=1}^n \sigma_{i1} \times \sigma_{i2} \times \sigma_{i3} \times \sigma_{i4}}{\sum_{i=1}^n \sigma_{i1} \times \sigma_{i2} \times \sigma_{i3} \times \sigma_{i4}}$$

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4. Adapun target triwulan pada IKU ini sebesar 3 dari 4.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja 3.1 yaitu sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2025 | Target Triwulan I | Realisasi | % Kinerja |
|---|--------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat | Indeks | 3 dari 4 | N/A | N/A | 100% |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Transportasi, Elektronika, dan Aneka | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|

Dalam mengukur Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka belum dapat dilakukan karena rencana aksi pada triwulan I adalah Persiapan Pelaksanaan Survei. Adapun realisasi dari target tercapai 100% diukur dari telah dilaksanakannya Persiapan Pelaksanaan Survei dengan menyiapkan *google form* survei yang nantinya akan disebarakan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | | | |
|--------------------------|---|---------------|---|
| No | Rencana Aksi TW I | Status | Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb) |
| 1. | Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka Semester I | Terlaksana | Telah disusun <i>form</i> survei layanan kepuasan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka |

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, diantaranya kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada survei dilakukan dengan memanfaatkan *google form* dalam penyebaran survei sebagai bentuk efisiensi anggaran.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I 2026, tidak ada kendala dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, telah dilakukan beberapa upaya untuk pencapaian target, yakni memastikan pelaksanaan survei tepat waktu dan tepat sasaran.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas di Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka ditunjukkan oleh pencapaian 1 indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka

Latar Belakang

Terwujudnya Tata Kelola di Unit Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik merupakan sasaran strategis yang berfokus pada Perspektif Learning and Growth dan merupakan turunan dari sasaran strategis Perspektif Learning and Growth level ke deputian yakni Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Baik. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Baik.

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Jumlah minimum IKU RB yang wajib didukung adalah SAKIP, Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Tingkat Implementasi Sistem Kerja.

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 85%. Adapun target triwulan pada IKU ini sebesar 25%.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, capaian indikator kinerja 4.1 yaitu sebesar 30.7% mencapai 122,8% dari target Triwulan I Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2026 | Target Triwulan I | Realisasi | % Kinerja |
|---|------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka | Persentase | 92% | 25% | 33,33% | 133% |

Pada Triwulan I Tahun 2026, telah dilaksanakan 4 dari 15 renaksi tahunan terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka. Adapun renaksi yang telah dicapai, antara lain: (i) Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU; (ii) Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan; (iii) Penyusunan Renja 2026; (iv) Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI

Atas terpenuhinya 4 dari 15 renaksi tahunan tersebut, maka diperoleh angka persentase renaksi terlaksana pada Triwulan I sebesar xxxxx dari target tahunan sebesar 85%. Angka ketercapaian kinerja Triwulan 1 adalah sebesar (memuaskan) dari target Triwulan I yang ditargetkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | | | |
|-------------------|--|------------|---|
| No | Rencana Aksi TW I | Status | Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb) |
| 1. | Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU | Terlaksana | Telah dilaksanakan Penyusunan PK, Manual IKU dan Rencana Aksi untuk mendukung SAKIP pada awal tahun 2026 |

| | | | |
|----|--|------------|---|
| | | | |
| 2. | Penyusunan laporan kinerja triwulanan (Ekon-Go) dan pelaporan capaian rincian output bulanan (E-monev) | Terlaksana | Penyusunan Narasi Kinerja Triwulan I sedang dalam tahap penyusunan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja Triwulan I |
| 3. | Penyusunan Renja 2026 | Terlaksana | Telah dilaksanakan penyusunan Renja 2026. |
| 4. | Optimalisasi pemanfaatan Srikandi | Terlaksana | Digitalisasi arsip melalui aplikasi SRIKANDI telah dilaksanakan hingga triwulan I tahun 2026 |

Selama Triwulan I tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi telah memperhatikan prinsip efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Beberapa bentuk penerapannya antara lain dengan menyusun dokumen Manual IKU, PK, dan Rencana Aksi secara internal di lingkungan kantor tanpa menyelenggarakan kegiatan di luar seperti paket meeting, sehingga dapat menekan biaya operasional. Selain itu, pemanfaatan aplikasi SRIKANDI sebagai media arsip digital turut berkontribusi dalam mengurangi kebutuhan pencetakan dokumen, menjadikannya solusi yang lebih hemat biaya sekaligus ramah lingkungan. Efisiensi ini semakin diperkuat dengan adanya kebijakan penghematan anggaran di awal tahun 2026, yang mendorong unit kerja untuk menjalankan proses bisnis dan pelaksanaan IKU 4.1 secara lebih optimal dan efisien.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Dalam upaya mencapai target, salah satu tantangan yang dihadapi adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN. Kebijakan ini mengharuskan penyesuaian terhadap pola kerja yang lebih efisien, sehingga beberapa kegiatan mengalami penundaan. Meski demikian, langkah-langkah adaptif telah diambil, termasuk penyesuaian strategi dan metode kerja yang sejalan dengan prinsip efisiensi, guna memastikan target tetap dapat dicapai secara optimal di tengah keterbatasan anggaran.